



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

LAPORAN SINGKAT

KOMISI VI DPR RI

BIDANG INDUSTRI, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM, BUMN, DAN INVESTASI

Rapat ke	:	18 (Delapan belas)
Tahun Sidang	:	2021-2022
Masa Persidangan	:	II
Jenis Rapat	:	Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan Wakil Menteri BUMN II
Hari, Tanggal	:	Selasa, 14 Desember 2021
Pukul	:	14.00 WIB
Sifat	:	Terbuka
Pimpinan Rapat	:	Mohamad Hekal., M.B.A/ Wakil Ketua Komisi VI DPR RI
Sekretaris Rapat	:	Dewi Resmini, S.E., M.Si., Kabagset. Komisi VI DPR RI
Tempat	:	Ruang Rapat Komisi VI DPR RI, Gedung Nusantara I Lt. Dasar Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta 10270
A c a r a	:	Pembahasan mengenai rencana Restrukturisasi PT Barata Indonesia (Persero)
Hadir	:	1. 29 orang dari 54 Orang Anggota Komisi VI DPR RI; 2. Wakil Menteri BUMN II, Bapak Kartika Wirjoatmodjo 3. Direktur Utama PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA), Bapak Yadi Jaya Ruchandi 4. Direktur Utama PT Danareksa (Persero), Bapak Arisudono Soerono 5. Direktur Utama PT Barata Indonesia (Persero), Bapak Bobby Sumardiat Atmosudirjo 6. Direktur Wholesale Transaction Banking BSI, Bapak Kusman Yandi beserta jajarannya.

I. PENDAHULUAN

1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 251 ayat (1) Tata Tertib DPR RI, Ketua Rapat membuka Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan Wakil Menteri BUMN II pada pukul 14.50 WIB dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan Wakil Menteri BUMN II pada hari Selasa, 14 Desember 2021, dengan acara dan waktu sebagaimana tersebut di atas, dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Mohamad Hekal., M.B.A

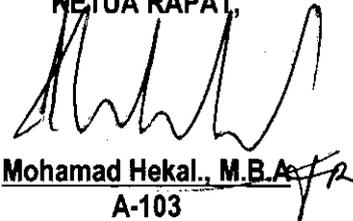
II. KESIMPULAN RAPAT

1. Komisi VI DPR RI mengapresiasi langkah Kementerian BUMN dalam proses restrukturisasi PT Barata Indonesia (Persero) melalui jalur PKPU yang bertujuan memberikan perlindungan kepada BUMN agar dapat kembali mengembangkan bisnisnya.
2. Komisi VI DPR RI meminta Kementerian BUMN senantiasa memperhatikan kondisi supplier atau vendor BUMN mengingat sebagian besar supplier adalah pelaku usaha UMKM yang juga mempunyai peran yang besar dalam pembukaan lapangan pekerjaan di Indonesia. Diharapkan proses PKPU PT Barata Indonesia (Persero) tidak menyebabkan penurunan kualitas kredit supplier kepada perbankan.
3. Komisi VI DPR RI mendukung langkah penyelesaian supplier PT Barata Indonesia (Persero) yang dibiayai oleh PT Bank Syariah Indonesia, Tbk sesuai dengan koridor yang telah diputuskan dalam PKPU yaitu melalui novasi pembiayaan supplier kepada PT Barata Indonesia (Persero).
4. Komisi VI DPR RI mendukung proses diskusi *business to business* yang berkelanjutan antara PT Jamkrindo Syariah dan PT Bank Syariah Indonesia, Tbk sebagai bagian dari perbaikan ekosistem pembiayaan supplier di lingkungan BUMN.
5. Komisi VI DPR RI meminta Kementerian BUMN agar mengawal penyelesaian proses novasi SCF supplier PT Barata Indonesia (Persero) sesuai dengan jadwal yang disampaikan pada Komisi VI pada rapat kerja hari ini.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pada pukul 15.40 WIB.

PIMPINAN KOMISI VI DPR RI
KETUA RAPAT,



Mohamad Hekal., M.B.A.
A-103